



STRATEGI KERJASAMA SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN

*THE STRATEGY OF COOPERATION BETWEEN REGIONAL MILITARY
COMMAND AND LOCAL GOVERNMENT IN FOOD SECURITY PROGRAMS*

Beni Sutrisno*, Nugraha Gumilar, Mitro Prihartoro
Universitas Pertahanan RI
* email: beni_sutrisno@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia) – Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kerjasama antara Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dan Pemerintah Daerah dalam program ketahanan pangan, dengan fokus pada upaya memperkuat tata kelola kolaboratif antara kedua institusi tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap informan kunci dari unsur Satkowil, Pemerintah Daerah, Perum BULOG, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dan Pemerintah Daerah dalam program ketahanan pangan telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung utama keberhasilan program adalah komitmen pimpinan daerah, peran aktif Babinsa di tingkat desa, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan analisis SWOT, strategi penguatan sinergi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi formal lintas lembaga, integrasi program ketahanan pangan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan optimalisasi peran Satkowil sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dan Civil-Military Cooperation (CIMIC) menjadi landasan penting dalam memperkuat kolaborasi antara Satkowil dan Pemerintah Daerah. Sinergi yang efektif antara kedua pihak tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah.

Kata Kunci: Satkowil, Pemerintah Daerah, Ketahanan Pangan, Sinergi, Collaborative Governance



Abstract (English) – Food security is one of the main pillars in maintaining national stability and supporting state defense development. This study aims to analyze the cooperation strategy between the Regional Military Command and the Local Government in implementing food security programs, focusing on strengthening collaborative governance between both institutions. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving key informants from Satkowil units, local government offices, BULOG, agricultural field instructors (PPL), and farmer groups. The findings indicate that cooperation between Regional Military Command and the Local Government in food security programs has been implemented but remains suboptimal. The main challenges include weak intersectoral coordination, overlapping authorities, and limited resources. The supporting factors are strong leadership commitment, the active role of Babinsa at the village level, and the central government's policy support on food security. Based on the SWOT analysis, synergy can be strengthened through enhanced institutional coordination, integration of food security programs into regional development plans, and optimization of Satkowil's role as a strategic partner in regional development and territorial guidance. This research highlights that the application of Collaborative Governance and Civil-Military Cooperation (CIMIC) principles is fundamental in reinforcing the collaboration between Regional Military Command and Local Governments. Effective synergy between both parties not only strengthens national food security but also contributes to community welfare and regional stability.

Keywords: Regional Military Command, Local Government, Food Security, Synergy, Collaborative Governance

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu dimensi strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Pangan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan dapat memicu instabilitas politik dan konflik sosial, sehingga negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya akan menghadapi kerentanan serius terhadap ancaman non-tradisional maupun tradisional (Soetrisno, 2020:15).

Dalam skala global, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks akibat perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga pangan internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melaporkan bahwa



pada tahun 2022 terdapat sekitar 828 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipandang semata sebagai isu ekonomi, melainkan bagian integral dari agenda pertahanan dan keamanan global (FAO, 2022).

Ketahanan pangan saat ini menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. FAO (2022) mencatat bahwa perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, serta ketidakpastian geopolitik menyebabkan peningkatan risiko krisis pangan di berbagai negara. Di tingkat nasional, pemerintah melalui RPJMN 2020–2024 menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan strategis. Dalam kerangka Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata), pangan memiliki posisi penting sebagai elemen pendukung ketahanan nasional, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah dan kesiapan logistik pertahanan.

Dalam konteks Indonesia, isu ketahanan pangan memiliki makna strategis yang melampaui dimensi ekonomi semata, karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar, kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan penguatan produksi pangan domestik, distribusi yang merata, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Selain itu, kebijakan ketahanan pangan juga ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nirmiliter, karena keterjaminan pangan dianggap sebagai faktor pendukung utama dalam membangun daya tangkal bangsa (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Namun, menjaga ketahanan pangan nasional bukanlah hal yang mudah di tengah berbagai tekanan global dan domestik. Dinamika perubahan iklim, urbanisasi



yang pesat, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan yang berimplikasi langsung terhadap produktivitas pangan nasional. Di sisi lain, ketergantungan pada rantai pasok global dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi titik lemah dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, TNI, serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep *whole-of-government and whole-of-society approach* dalam menjaga ketahanan nasional yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan masa depan (Ansell & Gash, 2008; Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 53,140 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 33,94 juta ton beras, sedangkan kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan sekitar 30 juta ton. Dengan demikian, Indonesia masih mengalami surplus tipis sekitar 3,94 juta ton. Namun, surplus ini sangat rentan terhadap pengaruh iklim ekstrem, alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2019-2025 mencapai 79.967 hektar (SK. BPN 31 Mei 2024), serta keterbatasan infrastruktur distribusi (BPS, 2024).

Di tingkat daerah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, produksi padi dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021, produksi padi tercatat sebesar 326.826,64 ton gabah kering giling (GKG), kemudian meningkat menjadi 343.427,84 ton pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian produksi mencapai 346.873 ton, namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 342.291,32 ton GKG. Fluktuasi ini menggambarkan adanya tantangan struktural dalam sistem produksi pangan daerah, baik dari aspek cuaca, ketersediaan sarana produksi, maupun efektivitas sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas produksi. Di sisi lain, tren tersebut juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Jombang tetap berperan penting sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Jawa Timur,



sehingga diperlukan strategi kolaboratif antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pertahanan, TNI AD melalui Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) turut aktif mendukung program ketahanan pangan. Data Kodam V/Brawijaya menunjukkan terdapat lebih dari 1.200 Babinsa di wilayah Korem 082/CPYJ yang bertugas di desa-desa, dengan salah satu peran strategisnya adalah mendampingi petani dalam kegiatan budidaya, penyediaan sarana produksi, serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Peran tersebut sejalan dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). Dengan demikian, keterlibatan Satkowil merupakan bentuk nyata Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam mendukung pembangunan nasional (Widjajanto, 2019:62).

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan, termasuk di bidang pangan. Kewenangan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan benih dan pupuk, hingga penyaluran bantuan bagi petani (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan kapasitas ini, Pemda merupakan mitra strategis Satkowil dalam mendukung program ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Meski demikian, kerjasama antara Satkowil dan Pemda dalam program ketahanan pangan belum sepenuhnya optimal. Terdapat dua kendala utama yang masih dihadapi. Pertama, lemahnya koordinasi lintas sektor, yang mengakibatkan belum sinkronnya perencanaan dan implementasi program. Kedua, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, yang sering kali menimbulkan ketidakjelasan peran serta menurunkan efektivitas pelaksanaan program. Kedua kendala ini menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan (Ansell & Gash, 2008:544).



Kondisi tersebut menegaskan urgensi perumusan strategi kerjasama yang lebih komprehensif antara Satkowil dan Pemda. Strategi yang dimaksud tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis pendampingan pertanian, tetapi juga pada penguatan tata kelola, mekanisme koordinasi yang efektif, serta harmonisasi kewenangan antar lembaga (Bryson, Crosby, & Stone, 2015:651). Dengan strategi yang tepat, hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga kerjasama antara Satkowil dan Pemda dapat berjalan lebih optimal.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian mengenai Strategi Kerjasama Satkowil dan Pemerintah Daerah dalam Program Ketahanan Pangan menjadi relevan sekaligus mendesak untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pertahanan serta manfaat praktis bagi peningkatan sinergi antar lembaga, sehingga ketahanan pangan dapat diwujudkan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional (Sugiyono, 2019:87).

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus utamanya adalah memahami fenomena sosial, khususnya strategi kerjasama antara Satkowil dan Pemerintah Daerah dalam program ketahanan pangan. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan eksplorasi makna, pemahaman mendalam, serta interpretasi terhadap gejala sosial dalam konteks alamiah. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali bagaimana dinamika kerjasama, kendala koordinasi, dan tumpang tindih kewenangan dipersepsikan oleh para aktor yang terlibat. Penggunaan metode kualitatif dinilai tepat karena penelitian ini tidak hanya mengukur besaran angka atau data statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman proses dan strategi yang dijalankan oleh Satkowil dan Pemda.



Desain penelitian merupakan rencana yang disusun peneliti untuk mengarahkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian ini dipertegas sebagai studi kasus instrumental, karena penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jombang, tetapi menggunakan kasus tersebut untuk memahami proses sinergi Satkowil–Pemda dalam konteks ketahanan pangan. Studi kasus ini memiliki batasan kasus (case boundary) yang jelas, yaitu ruang lingkup program ketahanan pangan yang melibatkan Satkowil, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, PPL, dan kelompok tani selama periode 2022–2024. Dalam penelitian ini digunakan desain studi kasus, karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial yang kompleks, yaitu strategi kerjasama Satkowil dan Pemerintah Daerah dalam program ketahanan pangan. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan pendekatan yang tepat ketika peneliti ingin menelaah fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak jelas.

Desain studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada dinamika kerjasama di satu wilayah tertentu, dalam hal ini wilayah Korem 082/CPYJ dengan fokus Kodim 0814/Jombang sebagai representasi daerah lumbung pangan. Melalui desain ini, peneliti dapat melakukan eksplorasi mendalam mengenai mekanisme kerjasama, kendala koordinasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan antara Satkowil dan Pemda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam memahami pola interaksi antar lembaga.

Selain itu, studi kasus memberi ruang bagi peneliti untuk menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang menggabungkan berbagai sumber informasi untuk memperoleh gambaran



menyeluruh mengenai suatu fenomena. Oleh karena itu, desain ini dianggap paling sesuai untuk mengungkap strategi kerjasama Satkowil dan Pemda dalam mendukung ketahanan pangan.

Hasil dan Pembahasan

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi kolaborasi antara Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dan Pemerintah Daerah dalam implementasi program ketahanan pangan di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang terletak di tengah Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu area pertanian dengan potensi besar, terutama dalam sektor padi. Daerah ini memiliki luas sekitar 1.159,50 km², yang mencakup 21 kecamatan, 4 kelurahan, dan 302 desa, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Dengan kondisi geografi dan struktur sosial masyarakat, Jombang berfungsi sebagai salah satu pusat penyimpanan pangan penting di Jawa Timur.

Di sisi kelembagaan, program ketahanan pangan di Jombang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Perum BULOG, serta Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 0814/Jombang. Satkowil, melalui Babinsa yang bertugas di setiap desa, aktif dalam mendampingi petani, memantau distribusi pupuk bersubsidi, dan memfasilitasi program peningkatan produksi pangan. Tugas ini adalah bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan proyek pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan produksi dan distribusi pangan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Satkowil dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan kegiatan bersama, seperti pendampingan kelompok



tani, pelatihan teknis pertanian, serta pemantauan dan evaluasi ketahanan pangan di tingkat kecamatan dan desa.

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Kabupaten Jombang menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung kemandirian pangan daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, produksi padi Kabupaten Jombang mencapai 342.291,32 ton gabah kering giling (GKG). Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menjadikan Jombang salah satu kontributor besar dalam produksi beras di Jawa Timur. Namun, potensi yang besar ini terbentur oleh berbagai tantangan, seperti peralihan fungsi lahan pertanian, keterbatasan sarana produksi, dan ketidaksesuaian antara berbagai instansi dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, penelitian ini menilai pentingnya menganalisis pola kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antara Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program ketahanan pangan di Jombang. Dengan analisis ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan kerjasama antar sektor, serta strategi yang dapat memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam mendukung ketahanan pangan dan kesiapan logistik daerah sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Dari sudut pandang ketahanan pangan, suksesnya pendampingan di sektor pertanian tidak hanya tergantung pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada kekuatan sistem sosial dan kelembagaan yang mendukungnya. Keberadaan Babinsa di kalangan petani memberikan dukungan sosial dan rasa saling percaya, yang memperkuat solidaritas komunitas dan keinginan untuk terlibat dalam program. Di sisi lain, PPL berfungsi sebagai sumber informasi teknis yang memperbaiki kemampuan produksi dan mutu hasil pertanian.

Keterpaduan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan hasil kolaborasi antara peningkatan kapasitas teknis dan penguatan jaringan sosial di



wilayah tersebut. Namun, kelemahan dalam program ini terletak pada kurangnya perencanaan terpadu antar sektor, sehingga keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh inisiatif individu di lapangan, bukan oleh sistem kelembagaan yang teratur. Ketidakharmonisan ini berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan peluang dari luar seperti kerjasama dengan BULOG, BUMDes, dan koperasi untuk mendukung kestabilan harga serta distribusi pangan.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti perubahan iklim, variasi harga, dan pergeseran fungsi lahan perlu diatasi dengan strategi penguatan kelembagaan dan pengembangan infrastruktur logistik daerah, agar ketahanan pangan dapat dicapai tidak hanya pada tahap produksi, tetapi juga pada ketahanan distribusi dan penyimpanan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama antara Satkowil dan Pemerintah Daerah telah berhasil dalam memperkuat ketahanan pangan dari aspek sosial dan teknis, tetapi perlu adanya penguatan dalam tata kelola dan infrastruktur agar dapat tumbuh menjadi kekuatan logistik daerah yang mendukung pertahanan negara secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Satkowil–Pemda telah berjalan namun belum mencapai tingkat kolaborasi penuh. Sebagian besar interaksi masih berada pada level koordinasi teknis lapangan, belum pada level perumusan kebijakan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance masih parsial, dan belum menjadi sistem terpadu yang didukung oleh kebijakan formal.

Kerjasama antara Satkowil dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), efektivitas kerjasama antar-aktor dipengaruhi oleh empat elemen utama: kejelasan peran, komunikasi, kepercayaan, dan struktur koordinasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara Babinsa, PPL, dan perangkat Pemda berjalan, namun belum didukung oleh struktur koordinasi formal yang kuat. Hal ini



menyebabkan sinergi yang terbentuk lebih bersifat informal, sehingga potensi duplikasi tugas dan miskomunikasi masih terjadi.

Dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, tampak bahwa kerjasama yang terjalin antara Satkowil dan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik melalui pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk kelompok tani. Babinsa memiliki peran dalam menciptakan hubungan sosial yang dekat, meningkatkan semangat kerja, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan. Sedangkan PPL bertugas memberikan bantuan teknis terkait dengan budidaya, pengelolaan lahan, pemilihan bibit, dan pengendalian hama.

Kerjasama ini didukung oleh dasar kebijakan berupa MoU antara Kementerian Pertanian dan TNI, serta instruksi dari pimpinan daerah mengenai percepatan swasembada pangan. Dengan demikian, ada kejelasan dalam legalitas dan panduan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan program.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama Satkowil dan Pemerintah Daerah dalam mengelola ketahanan pangan di Kabupaten Jombang, kesimpulan yang diperoleh, sebagai berikut

a. Pelaksanaan Kerjasama Satkowil dan Pemerintah Daerah: Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme kerjasama Satkowil–Pemda dalam program ketahanan pangan secara umum telah berjalan, namun masih berada pada level koordinasi teknis dan belum berkembang menjadi kolaborasi yang terstruktur. Struktur koordinasi formal belum sepenuhnya tersedia, sehingga interaksi antar-aktor lebih banyak berlangsung secara informal. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pelaksanaan program tidak maksimal.



b. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Program

Faktor-faktor yang mendukung program ini meliputi:

- 1) Hubungan sosial yang erat antara Babinsa dan masyarakat,
- 2) Keahlian teknis yang dimiliki oleh PPL,
- 3) Struktur organisasi Satkowil yang mencakup hingga tingkat desa, dan
- 4) Budaya gotong royong yang ada di masyarakat.

Di sisi lain, faktor yang menghambat mencakup:

- 1) Perencanaan antar sektor yang belum terintegrasi,
- 2) Tumpang tindih kewenangan antara Babinsa dan PPL merupakan kendala yang paling sering muncul di lapangan. Ketidakjelasan batas peran menyebabkan duplikasi tugas, terutama dalam pendampingan kelompok tani dan pengawalan distribusi sarana produksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip civil-military cooperation (CIMIC) belum dioperasionalkan secara optimal,
- 3) Kurangnya koordinasi resmi antar lembaga yang berjalan secara rutin, serta
- 4) kurangnya infrastruktur yang mendukung seperti irigasi dan penyimpanan pangan.

Hasil analisis IFAS (2,73) menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih unggul dibandingkan dengan kelemahan, sementara hasil analisis EFAS (2,55) mengindikasikan bahwa peluang eksternal lebih besar dibandingkan dengan ancaman.

c. Dampak Kerjasama terhadap Ketahanan Pangan dan Kesiapan Logistik Wilayah: Kolaborasi antara Satkowil dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif pada ketahanan pangan daerah, terlihat dari meningkatnya produktivitas pertanian serta peran aktif kelompok tani. Namun, pengaruhnya terhadap kesiapan logistik wilayah masih belum optimal, terutama karena adanya



keterbatasan infrastruktur cadangan pangan, pengelolaan distribusi, dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi belum sepenuhnya berhasil menjadi kekuatan logistik strategis untuk pertahanan wilayah.

Rekomendasi

Bagi Satkowil (Kodim / Koramil / Babinsa)

- a) Memperkuat peran dalam pembinaan wilayah melalui pendampingan yang terjadwal, terukur, dan tercatat untuk menjamin kelangsungan aktivitas pertanian.
- b) Meningkatkan cara komunikasi sosial dalam memotivasi petani serta menjaga keamanan wilayah yang mendukung produksi pangan yang lancar.
- c) Melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Pertanian untuk mengatur agenda dan sasaran pendampingan yang jelas.

Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Stakeholder Terkait)

- a) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai distribusi tugas Babinsa dan PPL, agar pendampingan kepada petani dapat berlangsung dengan efektif tanpa adanya tumpang tindih tugas.
- b) Mempercepat peningkatan infrastruktur pendukung, seperti renovasi sistem irigasi, penyediaan gudang pangan, serta pemenuhan alat-alat mekanisasi pertanian.
- c) Memperluas kerjasama dengan BULOG, BUMDes, dan koperasi untuk memperkuat pemasaran hasil panen serta menjaga kestabilan harga di kalangan petani.
- d) Pemerintah Daerah dapat menyusun regulasi berupa Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mekanisme kerjasama Satkowil–Pemda dalam program ketahanan pangan. Regulasi ini penting untuk memberikan



kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta dasar koordinasi yang lebih kokoh.

- e) Pemda dan Satkowil dapat membentuk tim lintas sektor (joint task force) yang bertugas khusus mengelola, mengawasi, dan memastikan sinergi program ketahanan pangan di tingkat kecamatan hingga desa. Tim ini harus beranggotakan Babinsa, PPL, perangkat daerah, dan perwakilan kelompok tani.

Bagi Kelompok Tani / Petani

- a) Meningkatkan kemampuan kelompok petani dalam mengatur produksi, penyimpanan hasil, dan pemasaran melalui pelatihan dan bimbingan yang berkesinambungan.
- b) Memaksimalkan fungsi lembaga tani seperti koperasi tani agar dapat mengurangi ketergantungan pada perantara dan mempertahankan harga jual hasil produksi.
- c) Dengan aktif berpartisipasi dalam program pendampingan serta mencatat hasil pertanian sebagai landasan evaluasi bersama.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pertanahan Nasional. (2024). Keputusan Kepala BPN tentang alih fungsi lahan pertanian nasional (SK 31 Mei 2024). Jakarta: BPN RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik produksi padi Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2024). Kabupaten Jombang dalam angka 2024. Jombang: BPS Kabupaten Jombang.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York, NY: Wiley.



- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Clausewitz, C. von. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Food and Agriculture Organization. (1996). *Rome declaration on world food security*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of food security and nutrition in the world 2022*. Rome: FAO.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan pertahanan negara*. Jakarta: Kemhan RI.
- Lemhannas RI. (2015). *Ketahanan nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Maxwell, S. (1996). Food security: A post-modern perspective. *Food Policy*, 21(2), 155–170. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(95\)00074-7](https://doi.org/10.1016/0306-9192(95)00074-7)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded*



- sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford: Oxford University Press.
- Soetrisno. (2020). *Ketahanan pangan dan stabilitas nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United States Agency for International Development. (1999). *Food security conceptual framework*. Washington, DC: USAID.
- Utami. (2023). Ketahanan pangan nasional dalam perspektif pertahanan negara. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 9(2), 115–130.
- Widjajanto, A. (2019). *Pertahanan negara dan peran TNI*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Winslow, D. (2003). Strange bedfellows: NGOs and the military in humanitarian crises. *International Journal of Peace Studies*, 8(2), 35–55.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.